

ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PENERIMA OTONOMI KHUSUS PADA KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI PAPUA TAHUN 2017-2021

Penul Herti Khalifatun Nisa Arifah¹, Nurul Hidayat², Samsul Arifin³

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bahaudin Mudhary Madura, Sumenep,
Jawa Timur, Indonesia

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Jawa Timur,
Indonesia

E-mail: nurulhidayat@unibamadura.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of districts/cities throughout Papua Province in 2017-2021. Financial performance is seen from the ratio of independence, effectiveness, efficiency and growth. This research is a type of quantitative research. The sample in this study is reports on the realization of district/municipality budgets throughout the Papua Province, totaling 29 districts/cities. The data used in this study is secondary data, namely from reports on the realization of district/city budgets throughout the Province of Papua which are calculated using the analysis method of the ratio of independence, the ratio of effectiveness, the ratio of efficiency and the ratio of growth. The results of this study indicate that the ratio of independence in the last five years is very low with a high level of dependence on external parties, the ratio of effectiveness is very high, the ratio of efficiency shows that PAD is not efficient in collecting PAD, the ratio of growth shows a fluctuating trend.

Keywords: *Local government, financial performance, financial ratios.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan salah satu bentuk desentralisasi yang bersifat asimetris, yaitu dengan diberlakukannya Otonomi Khusus terhadap daerah yang perlu perhatian khusus (Junaedi & Suswanta, 2021). Hal tersebut menyebabkan kewenangan yang diberikan pemerintah pada suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Perbedaan perlakuan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan juga mempertimbangkan beberapa hal seperti sejarah, agama, etnis, bahasa dan lain sebagainya (Uamang, Indra, & Sasmito, 2018). Desentralisasi asimetris ini diberikan

kepada beberapa daerah, salah satunya adalah Provinsi Papua dalam bentuk otonomi khusus.

Tahun 2001, Undang-Undang No. 21 telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang mengatur mengenai otonomi khusus untuk Provinsi Papua. Otonomi khusus Papua ini adalah bentuk pengakuan dan pemberian kewenangan yang diberikan kepada pemerintah dan masyarakat Papua untuk mengatur urusan dalam daerahnya secara mandiri, tetapi tetap dalam satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi khusus Papua secara politik merupakan sebuah kompromi antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua yang sebagian besar masyarakatnya menuntut untuk lepas dari wilayah NKRI Edyanto, Agustang, Idkhan, & Rifdan, 2021. Selain itu, kondisi letak Provinsi Papua yang berada di wilayah 3T menyebabkan Papua sedikit tertinggal baik secara politik, infrastruktur, pendidikan, ekonomi maupun kesehatan, sehingga kesenjangan yang ada antara Provinsi Papua dengan Provinsi-Provinsi lain di Indonesia dapat diatasi dengan adanya otonomi khusus (Kum & Sasmito, 2018).

Otonomi khusus ini juga dapat memberikan ruang bagi masyarakat asli Papua untuk berperan di wilayahnya sebagai subjek sekaligus objek pembangunan (Rochendi & Saleh, 2017). Kewenangan yang diberikan pada Provinsi Papua tersebut juga merupakan satu bentuk tanggung jawab yang besar bagi pemerintah dan masyarakat Papua untuk menguatkan potensi sosial budaya dan perekonomian yang hidup di masyarakat Papua. Untuk lebih mengetahui situasi dan kondisi daerahnya sendiri, diharapkan masyarakat Papua dapat mengimbangi provinsi lainnya.

Adanya otonomi khusus yang berorientasi pada penyelenggaraan pemerintah dengan hak otonomi yang seluas-luasnya ini akan mempengaruhi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua yang mana sumber pendanaan akan diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua (Burdam & Laka, 2022). Dana otonomi khusus tersebut adalah dana sah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Sumber penerimaan dana tersebut berasal dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Transfer dari Pusat dan lainnya yang sah. Dana

tersebut tentunya dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya (Hasibuan, 2021).

Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia karena memiliki luas tiga kali lipat dari luas Pulau Jawa, penduduk yang cukup sedikit serta masih banyak hutan perkebunan dengan keindahan alamnya. Akan tetapi, provinsi Papua masih kurang mampu mengelola sumber daya alam tersebut serta masih banyak kecurangan dalam anggaran pemerintah sehingga ekonomi dan pembangunan belum berjalan secara maksimal (Anwar, Abdullah, & Hadi, 2018). Lebih lanjut, Hasibuan (2021) mengatakan bahwa aspek transparansi dan akuntabilitas belum terpenuhi dalam laporan penggunaan dana otonomi khusus, hal tersebut dapat terlihat dari program pembangunan disetiap daerah yang masih kurang merata serta perekonomian hanya meningkat pada sebagian penduduk saja.

Penelitian ini akan meneliti kinerja keuangan dengan menggunakan rasio efektifitas, efisiensi, kemandirian serta rasio pertumbuhan pada laporan APBD seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua. Hal ini juga yang menjadikan salah satu pembeda dari penelitian- penelitian sebelumnya yakni pada penelitian ini akan meneliti seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Papua kemudian dibagi empat klaster sesuai dengan letak geografisnya. Pembagian Klaster tersebut beracuan terhadap pemekaran Provinsi di Pulau Papua yaitu tercantum pada UU Nomor 14, 15, 16 Tahun 2022. Berikut Tabel 1. akan memperlihatkan empat klaster dengan Kabupaten/Kotanya.

Tabel 1

Pembagian Klaster sesuai Letak Geografis Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua

Klaster Jayapura (Kabupaten/Kota)	Klaster Pegunungan (Kabupaten/Kota)	Klaster Selatan (Kabupaten/Kota)	Klaster Tengah (Kabupaten/Kota)
Sarmi	Mamberamo Tengah	Meraoke	Paniai
Keerom	Jayawijaya	Bevon digoel	Nabire
Kepulauan Yapen	Nduga	Asmat	Mamika
Jayapura	Yalimo	Mappi	Deiyai
Biak Numfor	Lanny Jaya		Intan Jaya
Mamberamo Raya	Talikora		Puncak
Supioro	Pegunungan Bintang		Dogiyai

Sumber : BPS Provinsi Papua (2022)

Dari data pembagian klaster sesuai letak geografis pada kabupaten/kota di Provinsi Papua dapat memberikan gambaran Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua. Berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, bertujuan untuk mengetahui klaster kabupaten/kota Se-Provinsi Papua yang kinerja keuangannya baik, dilihat dari rasio kinerja keuangan pemerintah daerah pada tahun 2017 sampai dengan 2021.

METODE

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian kuantitatif karena menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran dengan angka (Sugiyono, 2015). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui klaster kabupaten/kota Se-Provinsi Papua yang kinerja keuangannya baik, dilihat dari rasio kinerja keuangan pemerintah daerah pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Maka dari itu peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu data *Time Series*. Teknik ini dilakukan dengan cara mengutip atau menyalindari dokumen-dokumen yang relevan untuk digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini, yaitu dengan cara pengambilan data Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/kota Se-Provinsi Papua 2017-2021.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi APBD 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua yang terdapat dalam situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) selama 5 tahun terakhir (2017-2021). Kemudian akan dibagi 4 klaster sesuai letak geografisnya, digunakan untuk mengetahui daerah bagian mana yang lebih baik dalam melaksanakan otonomi khusus.

Definisi Operasional Variabel dan Metode Analisis Data

Definisi operasional variabel merupakan definisi untuk digunakan sebagai dasar

pada operasional penelitian. Selain itu, metode analisis data dalam penelitian ini ialah dengan cara menghitung indikator kinerja keuangan seperti yang terdapat pada penjelasan di bawah ini. Berikut penjelasan definisi operasional variabel penelitian ini dan pengukurannya.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian dapat dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah penerimaan PAD atau Penerimaan Asli Daerah dengan sumber penerimaan lainnya yaitu dana transfer dari pusat. Semakin tinggi PAD yang diterima maka semakin besar ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Kemandirian keuangan daerah mengindikasikan bahwa daerah mampu membiayai kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahannya secara mandiri (Halim, 2012). Berikut rumusan dalam menilai rasio kemandirian daerah (Mahmudi, 2007 : 84).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Transfer dari Pusat}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas merupakan alat ukur keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuannya. Hal yang perlu dicatat bahwa yang terpenting efektivitas tidak membicarakan tentang besar biaya yang dikeluarkan dalam mencapai tujuan. Nurhayati (2015) memproksikan bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah yang direncanakan. Berikut rumusan dalam menilai efektivitas :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Pengukuran rasio efisiensi dapat dilihat dari output dan inputnya, jika outputnya lebih tinggi dari inputnya maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Berikut rumus dalam penilaian efisiensi :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Pengelolaan keuangan dalam tingkat efisiensinya dapat dilihat dari sisi pengeluarannya, sehingga formula perhitungannya ialah rasio antara penerimaan daerah

dengan belanja rutin. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah yang tinggi dapat terlihat dari nilai rasio yang rendah.

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan merupakan alat untuk mengukur seberapa besar pemerintah mampu mempertahankan serta mengembangkan pencapaian keberhasilan dari satu periode ke periode berikutnya. Komponen sumber pendapatan dan pengeluaran yang diketahui pertumbuhannya digunakan sebagai evaluasi potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Berikut rumus dalam penilaian rasio pertumbuhan:

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah} = \frac{PAD_n - PAD_{n-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Rasio

Analisis Rasio Kemandirian

Tingkat kemandirian suatu daerah menggambarkan dari kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah yang diukur dengan rasio (PAD) secara mandiri. Penilaian tinggi rendahnya rasio kemandirian pemerintah daerah dapat dilihat pada penilaian rasio kemandirian, yang telah dicantumkan pada Tabel 1. Setelah dihitung rasio kemandirian pada penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel 2 sampai dengan Tabel 5 berikut.

Tabel 2

Rasio Kemandirian Kinerja Keuangan Klaster Merauke

Tahun	Realisasi PAD (Miliar)	Transfer dari Pemerintah Pusat (Miliar)	Rasio Kemandirian
2017	261,69	5.094,85	5%
2018	240,09	5.708,13	4%
2019	268,65	5.786,57	5%
2020	223,07	5.240,03	4%
2021	227,80	5.086,43	4%
Rata-rata			5%

Sumber : Data Sekunder Diolah (Diolah Excel)

Tabel 3

Rasio Kemandirian Klaster Kinerja Keuangan Pegunungan

Tahun	Realisasi PAD (Miliar)	Transfer dari Pemerintah Pusat (Miliar)	Rasio Kemandirian
2017	236,83	8.740,54	3%
2018	199,87	10.214,88	2%
2019	202,68	10.505,41	2%
2020	161,79	9.283,67	2%
2021	122,59	9.361,28	1%
Rata-rata			2%

Sumber : Data Sekunder Diolah (Diolah Excel)

Tabel 4

Rasio Kemandirian Kinerja Keuangan Klaster Jayapura

Tahun	Realisasi PAD (Miliar)	Transfer dari Pemerintah Pusat (Miliar)	Rasio Kemandirian
2017	374,19	8.408,11	4%
2018	443,93	8.333,14	5%
2019	558,61	8.706,35	6%
2020	453,47	7.860,30	6%
2021	541,23	7.835,57	7%
Rata-Rata			6%

Sumber : Data Sekunder Diolah (Diolah Excel)

Tabel 5

Rasio Kemandirian Kinerja Keuangan Klaster Tengah

Tahun	Realisasi PAD (Miliar)	Transfer dari Pemerintah Pusat	Rasio Kemandirian
2017	587,67	8.740,54	6%
2018	451,13	10.214,88	5%
2019	438,94	10.505,41	2%

2020	476,96	9.283,67	5%
2021	1.070,69	9.361,28	10%
Rata-rata			6%

Sumber : Data Sekunder Diolah (Diolah Excel)

Berdasarkan Tabel 2 sampai dengan 5 memperlihatkan bahwa rata-rata nilai rasio kemandirian kabuapten/Kota se-Provinsi Papua pada empat klaster tersebut masih sangat rendah. Nilai rasio kemandiriannya berada diantara 0% sampai dengan 25% selama 5 tahun terakhir. Data tersebut menandakan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pusat sangat tinggi.

Hasil Rasio Efektivitas

Keuangan daerah dapat diketahui efektif tidaknya dalam pengelolaan keuangannya dilihat dari seberapa besar realisasipendapatan asli daerahnya dibandingkan anggaran yang telah ditetapkan. Tabel 6 sampai dengan Tabel 9 menunjukkan rasio efektivitas pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua.

Tabel 6

Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Klaster Meraoke

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD (Miliar)	Rasio Efektifitas
2017	290,55	261,69	90%
2018	351,91	240,09	68%
2019	408,95	268,65	66%
2020	334,77	223,07	67%
2021	275,32	227,80	83%
Rata-rata			75%

Sumber : Data Sekunder Diolah (Diolah Excel)

Tabel 7

Rasio Efektivitas Klaster Kinerja Keuangan Pegunungan

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD (Miliar)	Rasio Efektifitas
2017	191,94	236,83	123%
2018	217,73	199,87	92%

Penul Hertin Khalifatun NA, Nurul Hidayat, Samsul Arifin, Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Penerima Otonomi Khusus Pada Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua 2017-2021

2019	189,71	202,68	107%
2020	201,05	161,79	80%
2021	181,86	122,59	67%
Rata-rata			94%

Sumber : Data Sekunder Diolah (Diolah Excel)

Tabel 8

Rasio Efektivitas Klaster Kinerja Keuangan Jayapura

Tahun	Anggaran PAD (Miliar)	Realisasi PAD (Miliar)	Rasio Efektifitas
2017	580,54	374,19	64%
2018	486,39	443,93	91%
2019	590,97	558,61	95%
2020	731,67	453,47	62%
2021	655,47	541,23	83%
Rata-rata			79%

Sumber : Data Sekunder Diolah (Diolah Excel)

Tabel 9

Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Klaster Tengah

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD (Miliar)	Rasio Efektifitas
2017	368,84	587,67	132%
2018	366,58	451,13	124%
2019	627,59	438,94	70%
2020	512,86	476,96	91%
2021	749,11	1.070,69	142%
Rata-rata			112%

Sumber : Data Sekunder Diolah (Diolah Excel)

Hasil perhitungan rasio efektivitas pada Tabel 6 sampai dengan 9 memperlihatkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua pada empat klaster tersebut memiliki tingkat rasio yang berbeda-beda dalam lima tahun terakhir. Rasio efektivitas terendah terdapat pada daerah klaster Merauke yang memiliki rata-rata

rasio efektifitas sebesar 75%. Sedangkan rasio efektivitas daerah klaster Jayapura sebesar 79% dan daerah klaster Pegunungan sebesar 94%. Rasio efektivitas tertinggi terdapat pada klaster Tengah, yaitu mencapai 112%.

Hasil Rasio Efisiensi

Pengukuran rasio efisiensi dapat diukur dengan membandingkan besaran biaya yang dikeluarkan dalam memungut pendapatan asli daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah yang diperoleh. Semakin rendah persentase rasio efisiensi maka semakin kuat efisiensi terhadap PAD. Berikut Tabel 10 sampai dengan Tabel 13 akan memperlihatkan hasil rasio efisiensi pada kabupaten/kota se-Provinsi Papua.

Tabel 10

Rasio Efisiensi Klaster Merauke

Tahun	Biaya Pemungutan PAD (Miliar)	Realisasi PAD (Miliar)	Nilai Efisiensi (Miliar)	Keterangan
2017	1.066,84	261,69	1 : 4,8	Tidak Efisien
2018	876,75	240,09	1 : 3,6	Tidak Efisien
2019	810,58	268,65	1 : 3,1	Tidak Efisien
2020	501,38	223,07	1 : 2,2	Tidak Efisien
2021	390,21	227,80	1 : 1,7	Tidak Efisien
Rata-rata			1 : 3,08	

Sumber : Data Sekunder Diolah (Diolah Excel)

Tabel 11

Rasio Efisiensi Klaster Pegunungan

Tahun	Biaya Pemungutan PAD (Miliar)	Realisasi PAD (Miliar)	Nilai Efisiensi (Miliar)	Keterangan
2017	712,70	236,83	1 : 3,1	Tidak Efisien
2018	740,36	199,87	1 : 3,7	Tidak Efisien
2019	1.246,40	202,68	1 : 6,1	Tidak Efisien
2020	548,08	161,79	1 : 3,3	Tidak Efisien
2021	629,42	122,59	1 : 5,1	Tidak Efisien

Rata-rata 1 : 4,26

Sumber : Data Sekunder Diolah (Diolah Excel)

Tabel 12

Rasio Efisiensi Klaster Jayapura

Tahun	Biaya Pemungutan PAD (Miliar)	Realisasi PAD (Miliar)	Nilai Efisiensi (Miliar)	Keterangan
2017	537,47	374,19	1 : 1,4	Tidak Efisien
2018	663,83	443,93	1 : 1,5	Tidak Efisien
2019	795,00	558,61	1 : 1,4	Tidak Efisien
2020	590,17	453,47	1 : 1,3	Tidak Efisien
2021	840,14	541,23	1 : 1,5	Tidak Efisien
Rata-rata			1 : 1,42	

Sumber : Data Sekunder Diolah (Diolah Excel)

Tabel 13

Rasio Efisiensi Klaster Tengah

Tahun	Biaya Pemungutan PAD (Miliar)	Realisasi PAD (Miliar)	Nilai Efisiensi (Miliar)	Keterangan
2017	826,08	587,67	1 : 1,6	Tidak Efisien
2018	840,68	451,13	1 : 1,8	Tidak Efisien
2019	1.130,35	438,94	1 : 2,5	Tidak Efisien
2020	1.254,87	476,96	1 : 2,6	Tidak Efisien
2021	477,83	1.070,69	1 : 0,4	Efisien
Rata-rata			1 : 1,78	

Sumber : Data Sekunder Diolah (Diolah Excel)

Tabel 10 sampai dengan Tabel 13 memperlihatkan bahwa nilai rasio efisiensi pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua pada empat klaster dalam lima tahun terakhir tersebut sangat tidak efisien. Hal tersebut diperlihatkan oleh PAD yang dihasilkan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PAD. Pada klaster Merauke dalam lima tahun terakhir untuk memperoleh 1 miliar PAD membutuhkan

3,08 miliar, kemudian pada klaster Pegunungan untuk memperoleh 1 miliar PAD membutuhkan 4,26 miliar, pada klaster Jayapura untuk memperoleh 1 miliar PAD membutuhkan 1,42 miliar dan pada klaster Tengah dalam memperoleh 1 miliar PAD membutuhkan 1,72 miliar. Empat klaster tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam memperoleh PAD masih belum meminimalisir biaya yang telah dikeluarkan.

Hasil Rasio Pertumbuhan

Analisis rasio pertumbuhan dapat digunakan sebagai tolak ukur sejauh mana pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan kemampuan pendapatan asli daerahnya dari periode keperiode berikutnya. Rasio pertumbuhan akan semakin baik jika rasio pertumbuhannya tinggi. Hal itu akan menyebabkan kinerja keuangan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan pendapatan asli daerahnya semakin membaik. Berikut Tabel 14 sampai dengan Tabel 17 akan memperlihatkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan.

Tabel 14

Rasio Pertumbuhan Klaster Merauke

Tahun	Realisasi PAD (Miliar)	Rasio Pertumbuhan
2017	261,69	-
2018	240,09	-8%
2019	268,65	12%
2020	223,07	-17%
2021	227,80	2%

Sumber : Data Sekunder Diolah (Diolah Excel)

Tabel 15

Rasio Pertumbuhan Klaster Pegunungan

Tahun	Realisasi PAD (Miliar)	Rasio Pertumbuhan
2017	236,83	-
2018	199,87	-16%
2019	202,68	1%
2020	161,79	-20%
2021	122,59	-24%

Sumber : Data Sekunder Diolah (Diolah Excel)

Tabel 16
Rasio Pertumbuhan Klaster Jayapura

Tahun	Realisasi PAD (Miliar)	Rasio Pertumbuhan
2017	374,19	-
2018	443,93	19%
2019	558,61	26%
2020	453,47	-19%
2021	541,23	19%

Sumber : Data Sekunder Diolah (Diolah Excel)

Tabel 17
Rasio Pertumbuhan Klaster Tengah

Tahun	Realisasi PAD (Miliar)	Rasio Pertumbuhan
2017	587,67	-
2018	451,13	-7%
2019	438,94	-3%
2020	476,96	6%
2021	1.070,69	127%

Sumber : Data Sekunder Diolah (Diolah Excel)

Berdasarkan Tabel 14 sampai dengan Tabel 17 dapat dilihat bahwa persentase pertumbuhan pada Kabupaten/Kota diempat klaster daerah di Provinsi Papua selama lima tahun terakhir memiliki tren yang fluktuatif. Nilai persentase terendah terdapat pada daerah klaster Pegunungan yaitu sebesar -24% pada tahun 2021, dimana pertumbuhan pada daerah klaster Pegunungan tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nilai persentase tertinggi terdapat pada Klaster tengah yaitu pada tahun 2021 yang pertumbuhannya mencapai 127%.

Pembahasan

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua berdasarkan Rasio Kemandirian.

Rasio kemandirian menjelaskan sejauh mana kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerahnya. Rasio ini juga akan memperlihatkan partisipasi masyarakat Papua dalam pembangunan daerahnya. Hal tersebut dapat diperinci bahwa besarnya partisipasi masyarakat meliputi pembayaran pajak dan retribusi daerah yang merupakan bagian penting dari PAD akan berdampak pada meningkatkannya rasio kemandirian suatu daerah. Cara menghitung rasio ini yaitu dengan membandingkan realisasi PAD dengan pendapatan transfer dari pusat. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin mandiri keuangan pemerintah tersebut (Mahmudi, 2019 : 140).

Penelitian ini menemukan bahwa rasio kemandirian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dalam kurun waktu lima tahun terakhir termasuk dalam kategori sangat rendah sekali. Rata-rata rasio kemandirian empat daerah klaster Kabupaten/Kota di Provinsi Papua berada diantara 0% sampai dengan 25%. Kesimpulan tersebut sesuai dengan tingkat kriteria penilaian kinerja keuangan berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.237 tahun 1996. Rendahnya rasio kemandirian menandakan jika sumber pendapatan asli daerahnya sangat rendah atau sangat kecil, seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah.

Sebagaimana adanya otonomi khusus yang berorientasi pada penyelenggaraan pemerintah daerah dengan hak otonomi yang seluas-luasnya dan memberikan ruang bagi masyarakat asli papua sebagai subjek sekaligus objek pembangunan, tetapi dalam hal ini otonomi khusus tersebut belum mampu melaksanakan tanggung jawab dalam mempertahankan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua. Kondisi tersebut juga menunjukkan jika pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah Provinsi/Pusat serta belum mampu mencukupi kebutuhan untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan seperti pembangunan daerah dan pelayanan sosial masyarakat. Hal tersebut mengharuskan pemerintah dan masyarakat kabupaten/kota se-Provinsi Papua lebih

menekankan terhadap peningkatan PAD terutama pada pendapatan lain-lain PAD yang sah.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua berdasarkan Rasio Efektivitas.

Rasio efektivitas dapat digunakan sebagai tolak ukur pemerintah dalam kemampuan mengorganisir penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang telah dianggarkan. Pengukuran rasio ini dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pendapatan asli daerah dengan anggaran pendapatan asli daerah (Mahmudi, 2019 : 141). Hasil penelitian ini menemukan bahwa rasio efektivitas kabupaten/kota se-Provinsi Papua pada empat daerahklaster tersebut cukup baik dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Rata-rata nilai rasio efektivitas sebesar 75% pada klaster Merauke, 112% pada daerah Klaster tengah, 79% pada daerah klaster Jayapura, dan 94% pada daerah klaster Pegunungan. Kesimpulan tersebut sesuai dengan tingkat kriteria penilaian kinerja keuangan berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.237 tahun 1996.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua berdasarkan Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan seberapa efisien pemerintah daerah dalam menggunakan biaya daerah untuk memungut pendapatan asli daerah. Rasio efisiensi diukur dengan cara melakukan komparasi biaya yang dikeluarkan daerah untuk memungut PAD dengan realisasi penerimaan PAD (Mahmudi, 2010). Penelitian ini menemukan hasil rasio efisiensi sangat tidak efisien. Hal itu dilihat dari lebih besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dari realisasi PAD yang diperoleh. Mengacu terhadap tingkat kriteria penilaian kinerja keuangan berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.237 tahun 1996, dimana nilai rata-rata rasio pada 5 lima tahun terakhir yang diperoleh oleh empat daerah klaster tersebut berada diatas 100% maka dapat dikatakan bahwa tingkat efisiensi pada empat daerah klaster tersebut sangatlah tidak efisien.

Kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan dikatakan tidak efisien tersebut menggambarkan suatu pemborosan. Hal itu menggambarkan bahwa pemerintah daerah dalam memperhitungkan alokasi fiskal yang digunakan dalam membiayai pembangunan dan kegiatan daerah tidak cermat dalam mengkalkulasi kapasitas fiskal daerah. Prioritas

pendanaan juga masih kurang, sehingga tidak optimal dalam mencapai target sasaran. Penghematan dalam menggunakan anggaran serta pengalokasian anggaran sebaiknya lebih mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan daerah untuk menunjukkan kinerja keuangan daerah yang sesuai prinsip *value for money* yang ekonomis, efektif dan efisien.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua berdasarkan Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan merupakan tolak ukur kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan dan mempertahankan pencapaian yang telah didapatkan dari satu periode ke periode berikutnya. Mengukurnya dapat dilakukan dengan melakukan komparasi jumlah PAD periode sebelumnya dengan jumlah PAD periode saat ini. Penelitian ini menemukan bahwa rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah di daerah Kabupaten/Kota pada empat klaster selama lima tahun terakhir mengalami tren yang fluktuatif.

Hal tersebut menandakan bahwa kabupaten/kota se-Provinsi Papua tidak mampu mempertahankan pertumbuhan PAD yang telah dicapai sehingga rasio pertumbuhan PAD tidak stabil. Kemudian dalam meningkatkan pertumbuhan PAD, kabupaten/kota se-Provinsi Papua rendah dan sangat rendah. Hal tersebut dikarenakan nilai persentase rasio pertumbuhan pada empat daerah klaster selama 5 tahun terakhir rata-rata berada pada kisaran 0%-10% dan 10%-20%. Namun yang perlu diperhatikan pada rasio pertumbuhan disini yaitu pada daerah Klaster Tengah di tahun 2021 mengalami pertumbuhan yang signifikan dimana persentase pertumbuhannya mencapai 127%.

Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Empat Klaster Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua

Kinerja Keuangan Pemerintah daerah pada 4 klaster daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dalam lima tahun terakhir berdasarkan rasio kemandirian, efektifitas, efisiensi dan pertumbuhan memiliki nilai rasio yang berbeda. Rasio kemandirian memberikan gambaran bahwa pada 4 klaster tersebut, nilai rasio terendah terdapat pada klaster Pegunungan, yaitu dengan nilai rata-rata rasio sebesar 2% pada lima tahun

terakhir, kemudian klaster Jayapura dan Tengah memiliki nilai rasio yang sama yaitu sebesar 6%, dan merupakan nilai rasio tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Kemudian pada rasio efektivitas, klaster Tengah merupakan daerah yang sangat efektif, hal tersebut diperlihatkan dengan nilai rasio yang sangat tinggi, yaitu sebesar 112%, dan terendah terdapat pada daerah klaster Merauke yaitu sebesar 75%. Kemudian berdasarkan rasio efisiensi klaster Jayapura memiliki kinerja yang lebih baik, dimana dalam memperoleh 1 Miliar PAD membutuhkan 1,42 M, kemudian klaster Pegunungan memiliki kinerja yang sangat buruk, yaitu dalam memperoleh 1 Miliar PAD harus mengeluarkan biaya sebesar 4,26 M. Kemudian jika dilihat dari rasio pertumbuhan maka Klaster tengah lebih baik, dimana dalam meningkatkan PAD selama tahun ketahun mengalami peningkatan. Sedangkan klaster terburuk terdapat pada klaster pegunungan, hal tersebut diperlihatkan dari pertumbuhan PAD selama tahun ketahun semakin kecil.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan “Analisis Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua)”, yang kemudian dalam menganalisis kinerja keuangan disini dibagi empat daerah klaster sesuai letak geografisnyayang beracuan terhadap UU Nomor 14, 15 dan 16 Tahun 2022. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua berdasarkan analisis rasio kemandirian selama tahun 2017 sampai dengan 2021, menunjukkan pada kriteria yang sangat rendah, yaitu dengan diperolehnya rata-rata nilai rasio dengan persentase yang sangat rendah. Capaian tersebut dikarenakan dalam penerimaan daerah masih didominasi transfer dari pusat. Hal tersebut menunjukkan jika pemerintah daerah belum mampu secara mandiri melaksanakan otonomi daerah, sehingga pemerintah daerah masih sangat tergantung terhadap transfer dari provinsi maupun pusat. Hal tersebut juga menunjukkan jika otonomi khusus masih belum dimaksimalkan dengan baik.
2. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua selama tahun 2017 sampai dengan 2021 yang diprosikan berdasarkan analisis rasio efektivitas PAD

berada pada kriteria yang sangat efektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil rasio dengan persentase yang sangat tinggi. Data tersebut memberi gambaran bahwa pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua memiliki kinerja keuangan yang baik dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah melebihi PAD yang dianggarkan atau ditargetkan.

3. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua selama tahun 2017 sampai dengan 2021 yang diprosikan berdasarkan analisis rasio efisiensi PAD dikategorikan tidak efisien. Hal tersebut ditunjukkan dengan lebih besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PAD dari realisasi PAD yang diperoleh.
4. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua selama tahun 2017 sampai dengan 2021 memiliki tren yang fluktuatif. Hal tersebut menunjukkan jika kabupaten/kota se-Provinsi Papua tidak konsisten dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya.
5. Perbandingan kinerja keuangan pada empat daerah klaster sesuai letak geografis di Provinsi Papua jika dilihat dari :
 - a. Rasio kemandirian maka dari empat klaster tersebut sangat buruk.
 - b. Rasio efektifitas klaster tengah merupakan daerah yang sangat efektif dan kurang efektif pada klaster lainnya.
 - c. Rasio efisiensi klaster Jayapura lebih baik dan klaster Pegunungan sangat buruk.
 - d. Rasio pertumbuhan PAD pada daerah klaster tengah lebih baik, dan klaster pegunungan sangat buruk.

Rekomendasi yang ditawarkan oleh peneliti ialah Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam menjalankan roda pemerintahan pada tahun berikutnya. Kemudian dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah, diharapkan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk peningkatan pendapatan asli daerahnya, salah satunya melewati BUMD dan UMKM. Selain itu, dengan adanya otonomi khusus ini masyarakat Papua diharapkan menjadi subjek dan objek dalam pembangunan daerah. Serta diharapkan lebih taat dalam pembayaran pajak maupun retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Z. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun Anggaran 2016 – 2018 (Studi Kasus Pada Bpkad Kab. Lamongan). *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(No. 2 Edisi Juni 2019), 1113–1132.

- Apridiyanti, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Jawa Barat 2013- 2017. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 4(3), 32–41.
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, & Suryono, B. (2019). Pertumbuhan Eknoomi Terhadap Pemeribtah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur chrisna dwi heryanti Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(8), 1–21.
- Junaedi, A., & Suswanta. (2021). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Tata Sejuta*, 7(2), 1–17. Retrieved from <http://ejournalstiamataram.ac.id>
- Maulina, F., & Rhea. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 11–22.
- Ningrat, C. I. N. K., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(3), 1819–1837.
- Novikasari, L., & Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 204–2015. <https://doi.org/10.47080/progress.v3i2.942>.
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018). *Jurnal Kajian Bisnis*, 28(1), 89–105.
- Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen*, 8(5), 2834–2861.
- Putri, R. S., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi (JASa)*, 3(2), 256–268.
- Rahmatika, N. A., & Imron, M. (2022). *Pengaruh Kemandirian Daerah, Solvabilitas, Level of Capital Outlay terhadap Financial Distress pada Saat Pandemi Covid-19 Melalui Jumlah Penduduk sebagai Pemoderasi pada Pemerintah Kabupaten dan Kora di Provinsi Papua Tahu 2019-2020*. 10(1), 437–444. Retrieved from <https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/554>.
- Rochendi, S., & Saleh, K. A. (2017). Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Politik: Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 13(1), 1903–1919. Retrieved from <http://journal.unas.ac.id/politik/article/view/231/132>.
- Saputra, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik, Vol 10. No.*
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, 8(8), 4759–4787.

- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7, 147–153.
- Sugiyono. 2017. *METODE PENELITIAN; Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>.
- Umar, & Haryanto, T. (2019). Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Masalah Stunting Balita di Indonesia. *Media Trend*, 14(1), 41–48.
- Wahyudi, M., & Wulandari, E. (2017). Kinerja Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Magelang). *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(3), 26–32.
- Wahyudin, Y. (2022). Analisis desa / kelurahan pusat pertumbuhan wilayah sekitar calon ibu kota negara Indonesia Analysis of village regional growth center around the prospective capital of the state of Indonesia. *Forum Ekonomi FEBUNMUL*, 24(1), 195–203.
- Wiguna, K. A., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 3(2), 58–66.
- Zami, A. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 121–130. <https://doi.org/10.37481/sjr.v3i2.187>.
- Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Cakrawala*, 3(1), 61–74.